Wujud Kepatuhan Kelola Keuangan Daerah Secara Transparan dan Akuntabel, Bupati Irsyad Serahkan LKPD TA 2022 Tepat Waktu

Senin, 27 Maret 2023

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Maret 2023. Penyerahan LKPD tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Penyerahan LKPD ini dilakukan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pasuruan atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan LKPD tepat waktu. LKPD yang telah diserahkan akan diperiksa oleh BPK untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Pemeriksaan ini akan dilakukan berdasarkan empat aspek, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Sebelum menyerahkan LKPD, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan LKPD TA 2022 secara teleconference pada tanggal 26 Januari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam penyusunan Laporan Keuangan. Dalam Entry Meeting tersebut, juga dilakukan pengujian substantif terbatas terhadap transaksi/saldo beberapa akun Belanja, terutama pada akun Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Aset Tetap serta Belanja Tak Terduga.

LKPD merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). LKPD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Selain itu, LKPD juga dilampiri dengan ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, termasuk realisasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.